



**KASUS TP4D JADI PERINGATAN**

## Dua PNS Lolos dari Jerat KPK, Walikota Yogya Bersyukur

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Yogyakarta yang ikut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/8) siang sudah dipulangkan. Dua PNS itu statusnya hanya diminta klarifikasi atau saksi terkait dugaan korupsi Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) terhadap proyek drainase di Yogyakarta.

Mereka pun tak ikut jadi tersangka. Dua PNS itu adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Aki Lukman Nurhakim dan Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta Baskara Ariwibowo. Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku bersyukur karena kedua PNS itu tidak terlibat suap kepada dua oknum jaksa yang di-OTT oleh KPK di Solo.

"Kami bersyukur teman-teman kami dari pemkot tidak terlibat dalam kegiatan itu. Setelah diminta keterangan KPK, keduanya hari ini (kemarin) bisa kembali ke Yogya," kata Haryadi Suyuti kepada wartawan, Rabu (21/8).

Namun menurutnya, atas peristiwa itu menjadi peringatan bagi para PNS untuk berhati-hati dan waspada. Terutama dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pihaknya juga mengingatkan kepada para PNS agar tidak main-main dengan tindak pidana korupsi karena ada konsekuensi tindakan nyata.

*\* Bersambung ke halaman 9*

---

### PROYEK DRAINASE YANG MENYERET KE PENJARA

**1. NASIB PROYEK YANG DIKORUPSI**  
Pemkot Yogya menghentikan sementara proyek rehabilitasi saluran drainase di Jalan Dr Soepomo dan Bababaran (Supomo Cs) pasca Operasi Tangkap Tangan KPK yang menjerat jaksa Kejari Yogya. Proyek akan dilanjutkan dengan lelang ulang.

**2. STATUS ORANG YANG TERLIBAT**

- Tiga orang jadi tersangka dalam kasus ini, yakni jaksa Kejari Yogya yang jadi pendamping, seorang jaksa Kejari Solo dan pihak ketiga atau rekanan.
- Dua orang PNS kota Yogya yang ikut diamankan saat OTT dilepas KPK karena berstatus saksi.

**3. PENYIMPANGAN PROYEK**  
Jaksa Kejari Yogya, ESF sebagai pendamping proyek justru memainkannya dengan kerjasama bersama kenalannya, jaksa Kejari Solo, SSL. Tersangka ESF ditawarkan SSL agar memenangkan lelang pihak ketiga sebagai rekanan, yakni sebuah perusahaan di Solo. Mereka kemudian minta bantuan dua PNS di Koya Yogya agar lelang dimenangkan.

**4. UANG SUAP**  
Dua oknum jaksa itu sudah menerima total Rp 200 juta lebih dari pihak ketiga. Mereka dijanjikan uang 5 persen dari total nilai proyek, Rp 8,3 miliar.



ILUSTRASI: SIBHE

## Dua PNS

"Kami juga meminta PNS lainnya tetap tenang dan bekerja seperti biasa," ujarnya.

Atas kejadian itu, pihaknya juga akan mengintensifkan pengawasan internal Pemkot Yogyakarta seperti fungsi bagian pengendalian pembangunan dan inspektorat. Termasuk proses lelang pengadaan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) diminta tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

"Kami minat BLP tetap mengacu pada aturan dan tidak terpengaruh pada masukan atau saran yang berpotensi melanggar hukum," tegas Haryadi.

Dia menegaskan selama ini dalam

pekerjaan fisik dilakukan pengawasan ketat dengan mekanisme evaluasi tiga bulanan untuk melihat perkembangan realisasinya. Namun dia juga mengingatkan kepada para PNS agar tetap mengawasi pelaksanaannya walaupun sudah dikonsultasikan dan dikawal TP4D.

Terkait ruang Kepala Bidang SDA PUPKP Kota Yogyakarta, dia menyebut saat ini masih disegel stiker dalam pengawasan KPK. Dia akan meminta inspektorat agar proaktif menanyakan ke KPK kapan segel itu bisa dibuka.

Sedangkan dua PNS yang dimintai keterangan KPK terkait OTT oknum

### Sambungan halaman 1

jasa Kejarl Yogyakarta di Solo dibebaskan toleransi tidak masuk kerja dalam beberapa hari.

"Posisi hari ini mereka pulang. Senin depan saya minta bekerja lagi," tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019.

Ketiganya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan di Solo, Senin (19/8) malam.

Tiga tersangka tersebut, yaitu Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) GYA, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D), ESF, dan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta SSL.

Jaksa yang bertugas mengawal program itu justru memainkannya dengan mengatur agar lelang dimenangkan PT Manira Arta Mandiri. Sebagai imbalannya, mereka menerima uang ratusan juta rupiah.

(Tri) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			
4. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005